

## **Pengaruh Realisasi Pajak dan Retribusi Terhadap Rencana Anggaran Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah**

**Eka Sariningsih**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Malahayati, Bandar Lampung  
ekasariningsih@yahoo.com

**Abstract.** *The Purpose of This study was to determine the effect of the realization of the tax levy and realization of the plan of the original income budget in the implementation of regional autonomy in Tulang Bawang district in the year 2006-2013 either partially or simultaneously. The techniques of data collection in this study is the, interview, and documentation. In this study the authors use qualitative and quantitative data analysis. In general, the results of this research are as significant effect on the realization of tax revenue budget plan area is in the implementation, realization levy significant effect on the original income budget plan in the implementation of regional autonomy, realization and realization levy taxes jointly significant effect on the original income budget plan in the implementation of regional autonomy in Tulang Bawang in 2006-2013*

**Keywords:** : *Taxes, levies, PAD and Autonomy*

### **1. Latar Belakang**

Otonomi menjadi momentum besar untuk membangun daerah, namun jika kesiapan daerah belum memadai dapat menghambat pembangunan daerah itu sendiri. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditentukan faktor keuangan, daerah dapat dikatakan otonom terletak pada kemampuan keuangannya, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menggali sumber pendapatan daerahnya sendiri, Kaho (2007). Pendapatan Asli daerah merupakan gambaran potensi keuangan daerah berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah haruslah didukung oleh sumber keuangan dalam rangka membiayai pemerintahannya, hal ini bertujuan memberikan standar pelayanan yang akan menciptakan externalities yang akan merugikan kepentingan nasional jika tidak ada sumber keuangan. Affandi (2001). Pajak dan Retribusi merupakan alternatif yang sangat potensial sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan negara yang sangat potensial sebagai sumber penerimaan negara karena hal ini juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Pajak dan retribusi berfungsi juga sebagai instrumen anggaran.

Keberhasilan Pemerintahan daerah dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah tidak lepas dari peran serta instansi pemerintahan daerah yaitu "Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah" (DP2KD). Instansi Dinas tersebut berkaitan langsung dengan upaya daerah dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah, terutama pemasukan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan PAD melalui target dan realisasi pajak serta retribusi daerah sesuai dengan potensi yang ada dan kewenangan yang lebih luas dalam mengelolanya mengalami tantangan yaitu terbatasnya sumber daya yang memiliki kualitas untuk mengelolanya serta terbukanya pasar bebas dimana tingkat persaingan yang sangat tinggi. Untuk itu rencana dan realisasi pendapatan serta retribusi harus dapat tercapai dengan memperhatikan peran organisasi dan penerapan strategi peningkatan PAD. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh realisasi pajak dan realisasi retribusi terhadap rencana anggaran Pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

## 2. Kajian Pustaka

### Pajak

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada pemerintahan berdasarkan undang-undang yang berlaku, guna membiayai pengeluaran pemerintahan yang prestasinya kembali, tidak dapat ditunjuk secara langsung tetapi pelaksanaannya dapat dipaksakan. Syamsi (2000). Menurut Soemitro (2005) juga menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum. Pajak dapat juga disimpulkan merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan pemerintahan dengan tidak mendapat prestasi yang digunakan untuk penyelenggaraan jalannya pemerintahan.

### Pajak Daerah

Menurut Undang-undang no 28 tahun 2009 pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada kepala daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak juga dapat diartikan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.

### Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

### Anggaran sektor Publik

Mardiasmo (2002) menyatakan penganggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik selesai dilakukan. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

## 3. Metode Penelitian

### Analisis Data

#### Profil Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari: Realisasi pajak dan retribusi dari tahun dan anggaran Pendapatan Asli Daerah.

#### Populasi Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh daftar realisasi pajak dan realisasi retribusi dari tahun dan anggaran Pendapatan asli daerah tahun 1999-2013. Populasi yang dimaksud merupakan satuan yang menjadi sasaran dalam penelitian. Arikunto (2012).

#### Sampel

Pada penelitian ini penentuan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* atau pemilihan sampel bertujuan, merupakan teknik pengambilan sampel secara acak (*non probability*) yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Dari jumlah populasi yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian adalah daftar realisasi pajak dan realisasi retribusi selama 7 tahun terakhir (2006 – 2013)

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data ini digunakan studi Kepustakaan dan studi lapangan yaitu mengumpulkan data melalui literatur, tulisan-tulisan ilmiah serta dokumentasi dan wawancara.

### **Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package For Social Sciences*) 17.0. data diproses dengan melihat laporan keuangan. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan auditan selama tahun 2001 sampai tahun 2012 yang diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam teknik penentuan sampel diperoleh 13 sampel dari perusahaan manufaktur yang masih tercatat di BEI hingga 31 desember 2012.

### **Alat Analisis**

#### **Uji Normalitas Data**

Sebelum melakukan analisis data dengan regresi linier terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ghozali (2006)

#### **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas.

#### **Uji Regresi Linier Berganda**

Untuk mengetahui pengaruh realisasi pajak dan realisasi retribusi digunakan rumus regresi linier dengan dibantu program software SPSS Versi 16.00 dengan model

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots$$

#### **Uji parsial dengan Uji T**

Uji ini dilakukan dengan tujuan menguji kebenaran hipotesis secara parsial digunakan uji t dimana jika nilai sig < 0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima.

#### **Uji Simultan dengan Uji F**

Untuk menguji kebenaran hipotesis secara simultan menggunakan uji F, jika nilai sig < 0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima atau H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **Uji Normalitas Data**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas data dapat dilihat dengan nilai skewness. Nilai Skewness digunakan untuk mengetahui bagaimana distribusi normal data dalam variabel dengan menilai kemiringan kurva. Berdasarkan data bahwa titik titik data disekitar garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa data variable yang digunakan adalah data yang menyebar normal. Data Realisasi pajak, realisasi retribusi dan anggaran pendapatan asli daerah dinyatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### **Uji Multikolinieritas**

Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas adalah besarnya VIP (variance Inflation Faktor dan tolerance. Hasil perhitungan disimpulkan bahwa variable ini tidak mengandung masalah dalam multikolinieritas yaitu tidak ada variable yang memiliki nilai tolerance kurang dari 10 persen hal yang sama menunjukkan juga pada perhitungan VIF bahwa variabel bebas tidak ada yang memiliki nilai VIF lebih dari 10.

### **Uji Autokorelasi**

Berdasarkan nilai Durbin Watson bahwa angka tersebut masuk dalam daerah tidak ada autokorelasi.

### **Uji Heterodekasitas**

Berdasarkan uji glejser bahwa nilai sigfikasi antara variabel independen dengan absolute residualnya lebih dari 0,005 maka dapat dikatana bahwa tidak terjadi masalah heteroskedasitas pada model regresi.

### **Regresi Linier Berganda**

Hasil uji regresi linier berganda bahwa variabel realisasi pajak dan realisasi retribusi mampu menjelaskan perubahan sebesar 94,6 % terhadap anggaran pendapatan asli daerah di kabupaten tulang bawang, sedangkan faktor lainnya yang tidak dapat dijelaskan dalam model 5,4 %.

### **Pengujian Hipotesis**

Berdasarkan uji t tes variabel realisasi pajak terhadap anggaran pendapatan asli daerah didapat t hitung 3,034 dengan tingkat signifikansi 0,039. Ho ditolak dan Ha diterima dengan demikian hipotesis pertama realisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap anggaran pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hipotesis kedua realisasi retribusi berpengaruh signifikan terhadap anggaran pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan nilai t hitung sebesar 0,750 dengan tingkat signifikan 0,045. Berdasarkan uji anova atau F tes di dapat F hitung sebesar 34,987 dengan tingkat sinifikant 0,003 karena probability atau tingkat significant jauh lebih kecil dari 0,05 maka realisasi pajak dan realisasi retribusi berpengaruh terhadap anggaran pendapatan asli daerah, dengan demikian hipotesis ketiga bahwa realisasi pajak dan retribusi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap anggaran pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diterima.

### **Pembahasan**

Berdasarkan uji Hipotesis I realisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap anggaran Pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pajak daerah memberikan kontribusi penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dan juga mendorong pertumbuhan daerah. Hal ini sesuai pendapat Ismawan, (2005). Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu daerah sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli daerah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi. Sebagai regulasi pajak dipergunakan sebagai pendapatan, stabilitas ekonomi, realokasi sumber sumber ekonomi dalam rangka mensejahterakan publik.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk mengglola sumber daya yang dimilikinya baik sumber daya alam, manusia dan teknologi agar terciptanya masyarakat yang sejahtera. Pemberian otonomi daerah memeberikan konsekuensi tersendiri, daerah dituntut untuk dapat menunjukkan kemampuannya serta kesiapan baik segi organisasi, sumber daya berupa aparat agar dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan melalui Pendapatan Asli Daerah.

Hasil uji hipotesis 2 yaitu realisasi retribusi terhadap anggaran Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan hal ini mencerminkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari daerah retribusi. Pemungutan retribusi daerah merupakan alternative dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah, retribusi daerah bentuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan otonomi daerah yang tercermin dari peran aktif masyarakat berupa retribusi yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini sesuai dengan pendapat Rasyid (2003) bahwa setiap daerah mempunyai visi yang sama yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara mengoptimalkan retribusi daerah. Penerimaan retribusi daerah sangat di pengaruhi dengan banyaknya jenis retribusi daerah yang diterapkan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan dengan penerimaan komponen tersebut.

Berdasarkan hasil uji R square sebesar 0,946 % atau 94,6 % berarti bahwa realisasi pajak, realisasi retribusi mampu menjelaskan anggaran Pendapatan Asli daerah (PAD) dan sisanya dijelaskan oleh

variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model. Pelaksanaan otonomi daerah berhasil jika daerah tersebut dapat membiayai pembangunan daerah tersebut. Sumber pembiayaan tersebut melalui pendapatan asli daerah, komponen pendapatan asli daerah berasal dari pajak dan retribusi daerah. Mengingat pentingnya komponen tersebut maka pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dituntut dapat bersikap profesional dan transparan agar tercapainya target realisasi pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan asli daerah berupa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pendapatan asli daerah yang paling penting karena setiap tahun memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Namun demikian, hingga saat ini tingkat pencapaian atau realisasi pencapaian pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Tulang Bawang jika dibandingkan dengan realisasi yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah setiap tahunnya belum tercapai hingga 100%. Oleh karena itu Pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang hendaknya menyusun rencana anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Tulang Bawang tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal ini harus dimbangi sejauh mana instrument atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan pertanggungjawaban yang transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini untuk mencegah adanya tumpang tindih ataupun ketersediaan pendanaan yang tersedia, mengingat terbatasnya pendanaan yang diberikan pemerintah pusat melalui dana perimbangan, maka daerah hendaknya dapat mencukupi pembiayaan tersebut melalui pendapatan asli daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dituntut menyusun rencana agar tercapai target Pendapatan Asli daerah (PAD), dengan penyusunan rencana anggaran tersebut diharapkan diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan, dengan adanya perbandingan antara anggaran dan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah maka diharapkan menjadi indikator atau tolak ukur serta acuan rencana anggaran pendapatan Asli daerah dalam pelaksanaan Otonomi daerah di Kabupaten Tulang Bawang

## **5. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap anggaran pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2006 -2013. Realisasi Retribusi berpengaruh signifikan terhadap anggaran pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2006 -2013. Realisasi pajak dan Retribusi secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap anggaran pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2006 -2013.

Realisasi pajak dan retribusi yang disusun di buat secara transparan dan apa adanya, sehingga rencana PAD yang disusun dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, Instansi pemerintah atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) hendaknya aktif dan bekerjasama dan menjalin mitra kerja yang baik dalam rangka mensukseskan penyusunan PAD agar PAD dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Penyusunan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) melibatkan partisipasi dari masyarakat dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat, dengan adanya partisipasi maka masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan dan penggunaan serta penyaluran dana. Untuk meningkatkan Pendapatan pemerintah daerah hendaknya perlu melakukan intensifikasi pemungutan jenis –jenis pajak daerah dan retribusi dan melakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

## **Daftar Pustaka**

- Amrah Muslimin. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Pustaka Indah. Yogyakarta.  
Arikunto. 2011. Dasar dasar Penetian Statistik Sosial. Bandung. Alfabet.

- Asmara, Jhon andra.2010. Analisis Perubahan alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (Apba) provinsi Nangroe Aceh darusalam. Jurnal telaah & Riset akuntansi . fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
- Boediono.2000. Anggaran Berbasis Kinerja. Rajawali Press. Jakarta
- Ghozali, 1993, pengelolaan keuangan public Jakarta, Balai pustaka
- Herawati, Jajuk & Sunarto. 2004. Anggaran perusahaan. Yogyakarta
- Imam Ghozali, 2006, prosedur dan penelitian statistik, Jakarta Gramedia
- Indra. 2006. Otonomi Birokrasi Partisipasi Dahara Preze semarang
- Ismail. 2002. perencanaan pembangunan pasca otonomi, Jakarta gramedia
- Ismawan. 2005. pengelolaan keuangan Daerah. Jakarta PT Indeks
- Kaho, Josef Riwu. 2007. Prospek Otonom Daerah Di Negara Republik Indonesia: Indentifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Kesit. 2005. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Jakarta, Gramedia
- Kuswadi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- M.Ryaas Rasyid. 2003.Prospek Otonomi Daerah. Rajawali Press. Jakarta
- Mardiasmo. 2002, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta
- Miyasto. 1997. Sistim Perpajakan Nasional Dalam Era Globalisasi, Semarang; Pidato Pengukuhan Guru Besar Media Dalam Ilmu Ekonomi
- Nafarin. 2004. Pengangguran Perusahaan. Jakarta. Salemba empat
- Nasution et all. 2008. Paradigma Baru OtonomiDaerah Implikasinya. Media Jakarta
- P.J.A. Andriani. 2001. Pajak Daerah, Gramedia, Jakarta
- Rochmat Soemito. 1996. Asas dan Dasar Peretribusian 1. PT Eresco, Bandung
- Rochmat soemito. 2005. Dasar-dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan Bayumedia. Malang
- Siahan. 2006. Pegelolaan Pendapatan dan Anggran Daerah. Jakarta. Graha Ilmu
- Suandy, Erly. 2005. Hukum Pajak edisi ketiga.Jakarta: salemba Empat
- Syamsi, Ibnu 2000. Dasar-dasar Kebijaksanaan keuangan Negara.Jakarta:Bina
- UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
- UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
- Waluyo & Ilyas Wirawan.B. 2003. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat, Jakarta
- Widjaja, HAW. 2002. otonom Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta. PT Raja Grafindo Perkasa